

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. F., & Mulyani, S. (2020). Pengaruh Good Governance Dan Latar Belakang Profesi Kepala Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(2), 142. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i2.352>
- Aswadi, S. A. W. (2014). *Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada pemerintah kabupaten pinrang) Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi D A N Bisnis Universitas Hasanuddin.* Kualitas Laporan Keuangan. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/10120>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). "Situs Pemda" Diakses 23 Februari, 2021. <http://www.bpkp.go.id/jatim/konten/583/Situs-Pemda.bpkp>
- Basukianto, F. C. P. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 45–50.
- BPK Perwakilan Jawa Timur. (2020). *BPK Berikan Opini WTP atas LKPD Provinsi Jatim TA 2019*. <https://Jatim.Bpk.Go.Id/Dari-Bpk/Bpk-Berikan-Opini-Wtp-Atas-Lkpd-Provinsi-Jatim-Ta-2019/>.
- Djanegara, M. S. (2017). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 461. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.252>
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi Sumarsono. (2009). Analisis Kemandirian Otonomi Daerah. *JESP* Vol. 1. No. 1. Hal. 20
- Hamsinar. (2017). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi kebijakan Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi*. 130.
- Idawati, W., & Eleonora, L. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Keuangan dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan. *Equity*, 22(2), 153. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.1367>
- Imam. Mulyana. 2010. Sumber Daya Manusia. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Khairudin, & Erlanda, R. (2016). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Se-Sumatera)*. 7(2).

Kharisma, B. (2018). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Survey pada Dinas Pemerintah Kota Bandung). *Widyatama*, 55. <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>

Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Manajemen YKPN. Hal-9

Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi Yogyakarta

Merialsa, A. (2017). *Akuntabilitas Publik Bab 2*. 14–65.

Mustofa. (2015). Metode Penelitian dengan NPF dan Roa. *Jurnal*, 1–9. Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Prakoso, D. A. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, sistem pengendalian intern dan peran teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten klaten. *Akuntansi*.

Pranaswati, H. V., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Semarang, U. N. (2020). Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25, 273–289.

PSAP Nomor 1 Paragraf 9 tentang Penyajian Laporan Keuangan

- Putri, A. A. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung). *Widyatama*, 7(2), 147– 173. <http://dx.doi.org/10.1016/j.intell.2008.09.007%0A>
- Rachmawaty, D. (2015). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat). *Widyatama*, 18, 19–28.
- Rasinta, A. (2017). *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. 2009*, 1–60.
- Risnayanti. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Transparansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Studi Pada Kantor BPKAD Kabupaten Luwu Utara). *Umpalopo*, 1–56.
- Septiningtyas, T. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *UMY*.
- Setiawan, W. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Emerald*, 2016.
- Siahaan, N. R. (2016). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kabupaten Deli Serdang. *HKBP Nommensen*, 1(1), 1–8. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0A>
- Suci Indah Lestari, E. (2020). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (Spi) Dan Ketidapatuhan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Unsri*, 2017(1), 1–9.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Sulistoni, G. 2003. *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan*. Nusa Tenggara Barat: SOMASI.
- Umar Husein. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 23E, Ayat 1
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan pemeriksa Keuangan
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. Pasal 7 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

- Wahyunik, S. (2020). *BPK Nyatakan “Disclaimer” Atas Laporan Keuangan Pemkab Jember Tahun 2019*.  
<https://Surabaya.Tribunnews.Com/2020/06/30/Bpk-Nyatakan-Disclaimer-Atas-Laporan-Keuangan-Pemkab-Jember-Tahun-2019>.
- Wiradjaya, P. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada Dinas Pemerintah Kota Bandung). *Widyatama*, 39(1), 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025%0A>
- Zulfikar, M. F. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang). *Widyatama*, 53(9), 287.